

GLOBAL INSIGHT JOURNAL

Jurnal Mahasiswa Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ>

DOI : <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2669>



Vol. 02 No. 01 Tahun 2025

Article Informations
Corresponding Email:
lianinty30@gmail.com

Received: 22/08/2025; Accepted:
07/02/2025; Published: 07/02/2025

KERJA SAMA INDONESIA DAN THAILAND DALAM MENGATASI KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA TAHUN 2021-2023

Liani Yuliyanti¹⁾ Yuswari O Djemati²⁾ Anggun Dwi Panorama³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Dalam konteks permasalahan narkotika yang kompleks dan meluas, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan peredaran narkotika, yang sebagian besar melibatkan jaringan internasional. Kerja sama dengan Thailand sebagai salah satu negara tetangga dan negara transit utama, merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Kerja sama Indonesia dan Thailand dalam menangani kasus narkotika di Indonesia tercantum dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi implementasi MoU terhadap penanganan kasus narkotika di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerja sama antara BNN RI dan ONCB Thailand pada tahun 2021-2023 belum terlihat signifikan karena adanya berbagai hambatan sehingga memerlukan komitmen yang berkelanjutan dan penyesuaian strategi agar lebih efektif.

Kata Kunci : Kerjasama Internasional, Indonesia, Thailand, Narkotika, MoU, BNN RI, ONCB Thailand.

Abstract

In the context of the complex and widespread narcotics issue, Indonesia faces significant challenges related to drug trafficking, much of which involves international networks. Cooperation with Thailand, as one of the neighboring countries and a key transit country, is a strategic step to address this problem. The collaboration between Indonesia and Thailand in handling narcotics cases in Indonesia is outlined in the Memorandum of Understanding (MoU) between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia (BNN RI) and the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) of Thailand. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis method to evaluate the implementation of the MoU in addressing narcotics cases in Indonesia. The study indicates that the implementation of cooperation between BNN RI and ONCB Thailand from 2021 to 2023 has not yet shown significant results due to various obstacles, thus requiring sustained commitment and strategy adjustments to be more effective.

Keywords: *International Cooperation, Indonesia, Thailand, Narcotics, MoU, BNN RI, ONCB Thailand.*

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan populasi dunia telah menimbulkan tantangan baru yang kompleks bagi masyarakat global, kurangnya sumber daya yang menjadikan hubungan internasional semakin kompleks. Selain itu, kemajuan Teknologi yang luar biasa berdampak signifikan pada cara kita berinteraksi dan melakukan tugas sehari-hari. Namun terlepas dari semua kecanggihan dan efektivitas teknologi ada juga sisi gelap yang perlu dipertimbangkan dalam konteks hubungan internasional adanya peningkatan kejahatan transnasional, fenomena ini semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Kejahatan transnasional merambah seluruh aspek kehidupan global dengan konsekuensi yang merugikan mulai dari perdagangan narkotika, perdagangan manusia, hingga pencucian uang. Mereka berkembang hingga saat ini karena adanya globalisasi, pergerakan migrasi, perkembangan pada informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat.

Thailand merupakan salah satu negara yang memiliki angka kasus kejahatan transnasional dalam bidang kejahatan narkotika terbesar, sejak

tahun 1970-an Thailand sudah menjadi wilayah terkenal yang memproduksi opium dan heroin dan pada tahun 1991 pemerintahan Thailand sudah melakukan tindakan dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang tindakan penindasan pelanggaran dalam kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.¹ Thailand berada di kawasan *Golden Triangle* membuat angka peningkatan kasus narkotika di Thailand meningkat, hal tersebut sangat dimanfaatkan oleh para oknum kejahatan karena memberikan keuntungan yang sangat besar bagi mereka, dimana proses perdagangan mudah untuk dilakukan dengan cara ilegal. Dapat diketahui bahwa kawasan *Golden Triangle* adalah kawasan penghasil narkotika jenis opium terbesar dan kawasan ini pemasok terbesar narkotika di Asia Tenggara, kawasan ini terletak di perbatasan Laos, Thailand dan Myanmar.

Thailand juga memiliki lembaga negara bernama ONCB (*Office of Narcotic Control Board*) yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan tentang Narkotika yang dibentuk pada tahun 1975, ONCB juga bertugas untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan kasus kejahatan narkotika. Lembaga ini bekerja dibawah Kementerian Hukum Thailand. Dengan adanya ONCB dapat membantu pemerintahan Thailand untuk menangani kasus narkotika di Thailand, lembaga ini juga termasuk lembaga yang melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga di negara lain. Pemerintahan Thailand membuat program *"War on Drugs"* guna untuk memerangi narkotika di negaranya yang direkomendasikan oleh Amerika Serikat.

Dengan adanya terus kasus penggunaan dan penjualan narkotika di setiap tahunnya, pemerintahan Thailand membuat strategi untuk mengontrol peredaran narkotika, seluruh masyarakat Thailand disuruh ikut serta untuk mengoptimalkan upaya mereka dalam mengatasi masalah narkotika yang dimana pengendalian obat-obatan terlarang dijadikan kebijakan pemerintah yang termasuk agenda nasional, di samping itu Thailand juga melakukan pembangunan Alternatif berkelanjutan, program

¹ Anggraini, Devi. "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara" Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3 (2016) Hal.37

ini sudah dilakukan sejak lama dan termasuk program yang dikatakan berhasil dilakukan oleh Mae Fah Luang Foundation, contoh keberhasilan dari program ini yaitu berhasil mengubah tempat penanaman opium menjadi tempat wisata di Thailand. Juga ada beberapa contoh lain nya seperti *opium poppy* yang awal mulanya tumbuh di ladang yang luas sekarang sudah digantikan dengan taman-taman.

Tidak hanya di Thailand kasus narkotika juga marak di negara Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki angka kasus kejahatan transnasional narkotika terbesar dan Indonesia termasuk negara yang memerangi tindak kejahatan ini, dilihat dari letak geografis yang posisinya berdekatan dengan kawasan *Golden Triangle* membuat negara Indonesia menjadi kawasan jalur transit perdagangan narkotika, harga pasar yang terbilang cukup rendah dibanding negara lain dan banyaknya peminat dalam kejahatan transnasional ini yang berpotensi semakin banyaknya oknum kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi peredaran gelap narkotika, pada peta perdagangan dunia Indonesia telah ditetapkan menjadi negara tujuan perdagangan ilegal narkotika yang pada awalnya Indonesia hanya menjadi negara transit saja, dilihat dari letak posisi negara Indonesia yang berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia serta dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia.² Dilihat dari letak Indonesia yang berada di wilayah Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota dari *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* yang merupakan kawasan *regionalisme* guna untuk meningkatkan keamanan dan perkembangan ekonomi tetapi Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan narkotika di Indonesia, pada dasarnya ASEAN memegang prinsip non intervensi atau biasanya disebut dengan ASEAN WAY yang menyebabkan ASEAN tidak dapat melakukan tindakan

² Irgi Prayoga, “Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dengan *The Office Of The Narcotics Control Board Thailand* (ONCB Thailand) Dalam Mengatasi Narkotika Di Indonesia Tahun (2019-2020)”, Universitas Sriwijaya, 2021,2.

tegas atau intervensi terhadap negara-negara anggota ASEAN jika sebuah pelanggaran ataupun mengancam keamanan negara lain.³

Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional Republik Indonnesia (BNN RI) terdeteksi adanya peningkatan yang tinggi pada setiap tahunnya, misalnya pada tahun 2009-2010 kasus narkotika di Indonesia meningkat sebanyak 60,66% dan angka kenaikan kasus narkotika pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan kembali sebanyak 6,87%, lalu di tahun 2013 angka kenaikan semakin bertambah sebanyak 11,47% setelah itu di tahun berikutnya, tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 8,77%, tidak hanya itu berdasarkan riset tahun 2021 oleh lembaga negara BNN RI, sudah tercatat bahwa penggunaan narkotika di Indonesia telah mencapai sebesar 4,2 juta orang dari keseluruhan populasi yang ada di Indonesia dengan rentang usia sekitar 10-59 tahun, yang dimana pada tahun 2021 adanya peningkatan angka penyalahgunaan narkotika dari sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 1,80% menjadi 1,95%, berdasarkan data diatas merupakan salah satu data akurat yang berasal dari lembaga resmi negara yaitu BNN RI dan hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia sudah memasuki tahap bahaya, karena kasus narkotika di setiap tahunnya terus meningkat dan melonjak tinggi.⁴

Pemerintahan Indonesia juga melakukan tindakan preventif untuk menanggulangi atau mengatasi kasus narkotika dengan bantuan dari beberapa lembaga negara seperti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan Kepolisian Indonesia, Indonesia terus berusaha untuk melawan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan peredaran narkotika yang sangat membutuhkan komitmen dan keseriusan untuk kerja sama dengan negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara, pemerintahan Indonesia sudah memandang bahwa status dan kondisi yang

³ Srifauzi, Aulia. Azhimi, Nurul. Mahendra, M Ikrar. "Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) di ASEAN" PIR Journal. Vol. 7 No.1 (Agustus 2022) Hal. 31-45.

⁴ Tabitha, Sarah. Situmeang, Nurmasari. Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi. "Kerja sama Indonesia- Thailand Dalam Pemberantasan Narkoba Menuju Drug-Free ASEAN 2015". Frequency of International Relations. Vol. 4. No. 1. Hal. 89-90.

sedang dialami sudah dalam bahaya tingkat tinggi atau besar yang diakibatkan oleh narkotika, pemerintahan Indonesia juga menetapkan bahwa negara ini sedang dalam kondisi tingkat darurat narkotika nasional, setiap harinya tercatat ada 50 orang yang merenggut nyawanya akibat dari banyak dan meningkatnya kejahatan narkotika, karena hal itu pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan atau hukum negara untuk para bandar narkotika dengan hukuman yang seberat-beratnya sampai dengan hukuman mati dengan cara ditembak.⁵

Dilihat dari perkembangan kasus narkotika di Thailand dan upaya yang pemerintahannya lakukan, pemerintahan Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dengan Thailand sebagai salah satu upaya dari pemerintahan Indonesia untuk mengatasi kasus narkotika, dengan adanya hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand yang telah terjalin cukup lama selama 67 tahun semenjak tahun 1950 membuat hubungan antara kedua negara ini cukup baik dan hal tersebut juga yang mempengaruhi Indonesia untuk menjalin kerja sama untuk kepentingan nasionalnya, Indonesia dan Thailand juga sudah menjadi mitra mitra ASEAN yang memiliki tujuan yang sama baik dalam isu regional maupun internasional, dengan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dan Thailand tidak pernah memiliki konflik satu sama lain sudah banyak kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dalam berbagai bidang misalnya seperti bidang ekonomi, bidang keamanan, hubungan budaya, termasuk kerja sama dalam penanganan kasus narkotika yang setiap tahunnya masih terus bertambah.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) selaku Lembaga nasional Indonesia yang bertugas dalam mengatasi kasus narkotika melakukan hubungan bilateral dengan lembaga nasional Thailand yang mengawasi narkotika yaitu *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand, keduanya memutuskan untuk melakukan kesepakatan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan membentuk dan

⁵ Srifauzi, Aulia. Azhimi, Nurul. Mahendra, M Ikrar. "Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) di ASEAN" PIR Journal. Vol. 7. No.1 (Agustus 2022). Hal.41

menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) Between the National Narcotics Board of The Republic of Indonesia and The Office of the Narcotics Control Board of the Kingdom of Thailand on The Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Their Precursors and Chemicals, and Drug Abuse* sebagai dasar hukum kerja sama antara BNN RI dan ONCB Thailand yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016.

PEMBAHASAN

Kerja sama yang sudah disepakati oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand sejak tahun 2016 berlaku dalam jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode yang sama, kecuali salah satu pihak memberitahukan pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri memorandum saling pengertian ini enam bulan sebelum tanggal pengakhiran, yang dimana jika dalam perhitungan sejak tahun 2021 kerja sama yang terjalin antara BNN RI dan ONCB Thailand berakhir dan secara otomatis diperpanjang hingga tahun 2024 karena dari kedua belah pihak tidak ada pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri kerja sama ini.

Selama kerja sama yang sudah terjalin sejak 2016-2021 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand telah menghasilkan *Bilateral Meeting* pertamanya yang dilakukan dengan maksud untuk saling tukar informasi mengenai pointer dari MoU Kerja Sama yaitu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada tanggal 25-28 November 2019 di Hotel *Reverie by Katathani Chiang Rai*, Thailand.⁶ Dalam pertemuan pertama ini sebagai implementasi dari adanya MoU yang sudah ditandatangani BNN RI dan ONCB Thailand yang membahas pertukaran informasi tentang situasi narkotika dari masing-masing negara dan peningkatan kerja sama khusus dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), lalu dalam

⁶ Dayamas, “Bilateral Meeting Indonesia dan Thailand dalam P4GN” Badan Narkotika Nasional Republik Indoensia (BNN RI), (27 November 2019) internet. 17 Agustus 2024. <https://bnn.go.id/>

pertemuan ini membahas pengawasan di kedua negara serta *sharing best practices* dalam bidang pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat dan laboratorium forensik sehingga diharapkan mampu mencegah masuknya narkoba secara ilegal baik melalui jalur laut maupun udara.

Tahun 2021 yaitu perpanjangan secara otomatis MoU Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand, tetapi di tahun 2021 seluruh negara di penjuru dunia sedang mengalami wabah virus berbahaya atau bisa disebut dengan pandemi *COVID-19* yang dimana negara Indonesia dan Thailand pada saat itu masih melakukan *Lockdown* yang mengharuskan setiap masyarakatnya untuk mengurangi aktivitas diluar rumah karena virus ini dapat merenggut nyawa setiap orang yang memiliki imunitas tubuh yang kurang baik, maka dari itu banyak aktivitas yang terhambat sehingga berpengaruh kepada aktivitas internasional. Dari adanya pandemi *COVID-19* mempengaruhi keberlanjutan kerja sama yang dilakukan oleh BNN RI dan ONCB Thailand membuat *Bilateral Meeting* kedua yang sebelumnya telah direncanakan dibatalkan dan berencana untuk mengundur waktunya hingga kondisi di dalam negara Indonesia dan Thailand sudah membaik dan diperkirakan sudah dapat menjalankan pertemuan tatap muka dengan baik.

Tetapi disisi lain melihat kondisi kasus narkotika di Indonesia yang meningkat karena adanya pengaruh dari pandemi *COVID-19*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) pada tahun 2021 melakukan komunikasi dengan pihak ONCB Thailand untuk melakukan *Bilateral Meeting* dengan tujuan menindak lanjuti kelanjutan dari MoU Kerja Sama dengan memberi pilihan untuk dilakukan secara daring, tetapi karena di negara Thailand adanya keterbatasan kesiapan dalam melakukan *Bilateral Meeting* secara daring dan keadaan yang dapat dikatakan masih belum stabil karena Thailand memiliki kepentingan yang lain untuk melakukan upaya dalam mengatasi pandemi *COVID-19*, maka dari itu ONCB Thailand terlihat seperti mengulur waktu untuk melakukan *Bilateral Meeting* tetapi tidak mengabaikan komunikasi dari Indonesia akan tetapi pada tahun 2021 antara

BNN RI dan ONCB Thailand tidak ada *Bilateral Meeting* atau pertukaran informasi mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Tetapi Indonesia ikut turut diundang pada acara *Expert Group Meeting on Alternative Development* pada tanggal 15-16 Maret 2021 secara *virtual*, acara ini diselenggarakan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB), MOFA dan *Mae Fah Luang Foundation* Thailand.⁷ Dalam acara ini Indonesia mendapatkan berbagai pengalaman dari para negara *expert* yang sudah lebih dahulu sudah melakukan program pembangunan alternatif, selain itu juga dalam acara ini Indonesia mendapatkan informasi mengenai teknologi dalam mengatasi kasus narkotika.

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand masih belum melakukan *Bilateral Meeting* untuk keberlanjutan mengenai kerja sama dalam bidang P4GN secara tatap muka maupun virtual, status kejelasan terkait ajakan atau pesan yang dikirim oleh pihak BNN RI kepada pihak ONCB Thailand pun masih sama seperti tahun sebelumnya, ditambah dengan kebijakan dari pemerintahan negara Thailand yang merubah tingkatan golongan pada narkotika khususnya pada tanaman ganja, yang pada awalnya tanaman ganja adalah golongan narkotika tingkat 1 diubah menjadi golongan narkotika tingkat 4 dengan tujuan untuk dapat membantu dalam keperluan medis dapat diartikan tanaman ganja di Thailand pada tahun 2022 dilegalkan untuk kepentingan nasionalnya, akan tetapi dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Thailand membuat adanya perbedaan dengan perspektif hukum yang berada di Indonesia untuk melegalkan tanaman ganja karena pemerintahan Indonesia tetap menerapkan bahwa tanaman ganja adalah jenis narkotika golongan 1.⁸

Pada tahun 2022 Indonesia kembali diundang dalam acara *The 7th Expert Group Meeting (EGM) on Alternative Development (AD)* yang diadakan pada tanggal 28 November sampai 1 Desember 2022 yang berlangsung di

⁷ Wawancara (*online*), Dhini Dwi Mandiri, BNN RI, Jakarta (6 Agustus 2024)

⁸ *ibid.*

Thailand, acara ini diselenggarakan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB), MOFA dan *Mae Fah Luang Foundation* Thailand, dalam pertemuan ini memang bukan acara yang dikhususkan untuk BNN RI dan ONCB Thailand tetapi topik pembicaraan yang dibahas pada acara ini adalah program pemberdayaan alternatif yang dijelaskan oleh para *expert* dari perwakilan negara-negara *role model* yang menggunakan program pemberdayaan alternatif, pada acara ini Indonesia mendapatkan berbagai hal yang dapat dicontoh untuk meningkatkan program pembangunan alternatif yang berada di Indonesia.⁹

Program Pembangunan Alternatif adalah rancangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) sejak tahun 2016 yang merupakan program unggulan dari BNN RI dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang direalisasikan di wilayah Provinsi Aceh, program *Grand Design Alternative Development* (GDAD) ini sudah memasuki tahun keenam yang dapat mengembangkan ekonomi dan peningkatan pendapatan melalui pembangunan dan pengembangan wilayah dan perekonomian berbasis kearifan lokal serta menyatukan dan menggerakkan potensi masyarakat melalui kemitraan dan sinergi, keberhasilan dari program GDAD ini terlihat dari adanya pencapaian program yang dilakukan di Kabupaten Gayo Lues.¹⁰ Program *Grand Design Alternative Development* (GDAD) ini adalah hasil dari adanya pertukaran informasi yang dilakukan oleh BNN RI dengan ONCB Thailand.

Selain itu, hasil dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand dalam mengatasi kasus narkotika di Indonesia, pada tahun 2022 kedua belah pihak melakukan pertukaran innformasi secara informal yang berkaitan dengan Undang-Undang dan

⁹ *ibid.*

¹⁰ Humas BNN, “BNN RI Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Manutan Petani Ganja, Melalui Program *Alternative Development*” Badan Narkotika Nasional (22 Januari 2024) internet. 18 Agustus 2024 <https://bnn.go.id/bnn-ri-berhasil-tingkatkan-kesejahteraan-mantan-petani-ganja-melalui-program-alternative-development/>

pengalaman dalam bidang Hukum, Indonesia mendapatkan masukan dari Thailand dalam kebijakan Undang-Undang tentang legalisasi keratom di Indonesia, melihat negara Thailand yang sudah lebih dulu membuat kebijakan Hukum untuk melegalkan tanaman ganja di negaranya yang membuat Indonesia melakukan pertukaran informasi dalam hal ini.¹¹

Pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand akhirnya dapat melakukan *Bilateral Meeting* yang kedua setelah tertunda selama hampir tiga tahun karena adanya pandemi *COVID-19*. Tujuan utama dari pertemuan ini yaitu untuk meningkatkan kera sama yang telah dibangun oleh BNN RI dan ONCB Thailand terkait dengan masalah narkotika, dalam pertemuan kedua ini membahas terkait nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada tahun 2016 silan dan pembaharuananya dengan waktu yang sama, hal lain yang juga dibahas pada *Bilateral Meeting* yaitu terkait program *Alternative Development* khususnya dalam bidang pelatihan *life skill*, program pencegahan dan rehabilitasi berbasis masyarakat, *Bilateral Meeting* kedua ini dilaksanakan di Hotel Arya Duta Kuta Bali pada tanggal 26-29 November 2023.¹²

Pada pertemuan kedua antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand berdiskusi secara elas terkait aspek Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pada pertemuan tersebut kedua belah pihak menyepakati langkah-langkah kerja sama yang lebih tertata dan kuat untuk mengatasi kasus narkotika secara menyeluruh di wilayah negara masing-masing, BNN RI dan ONCB Thailand sepakat untuk melakukan patroli bersama di wilayah perairan, karena mengingat adanya potensi tinggi terjadinya tindak kejahatan narkotika di kawasan laut,

¹¹ Wawancara (*online*), Dhini Dwi Mandiri, BNN RI, Jakarta (6 Agustus 2024)

¹² Humas BNN, “BNN RI dan ONCB Thailand Gelar *Bilateral Meeting* Kokohkan Kerja Sama” Badan Narkotika Nasional (27 November 2023) internet. 18 Agustus 2024 <https://bnn.go.id/bnn-ri-oncb-thailand-gelar-bilateral-meeting-kokohkan/>.

lalu hal lain yang juga disepakati adalah upaya yang konkret untuk meningkatkan kerja sama di bidang intelijen dan pengawasan perbatasan. ¹³

Pada tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand melakukan operasi laut yang termasuk kedalam pengurangan penyediaan dan permintaan narkotika yang tertulis pada MoU Kerja Sama. Pada operasi laut Interdiksi terpandu ini, BNN RI dibantu oleh Bea Cukai Indonesia dengan sandi Gempur Peredaran Narkoba Bersama (Purnama). Operasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP) melalui wilayah perairan Indonesia. ¹⁴

KESIMPULAN

Maka dari itu dengan adanya MoU Kerja Sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand dalam mengatasi kasus narkotika belum dapat dinyatakan atau dilihat keberhasilannya di tahun 2021-2023 karena adanya berbagai kendala yang terjadi seperti pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2021-2022 sehingga mengganggu proses pertemuan antara keduanya, tetapi pada tahun 2023 BNN RI dan ONCB Thailand sudah mulai melakukan *Bilateral Meeting* dan pertukaran informasi untuk meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin dan menindak lanjuti berbagai kerja sama dalam P4GN. Tidak sedikit pula upaya yang dilakukan oleh BNN RI sendiri untuk memerangi kasus narkotika di Indonesia pada tahun 2021-2023.

¹³ Humas BNN, “Indonesia - Thailand Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Lawan Narkotika”, Badan Narkotika Nasional (28 November 2023) internet. 18 Agustus 2024, <https://bnn.go.id/indonesia-thailand-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-lawan-narkotika/>.

¹⁴ Admin Bea Cukai, “Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023 Dimulai, Bea Cukai Perkuat Pengamanan Laut Indonesia” Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (25 Mei 2023) internet. 20 Agustus 2024 <https://beacukai.go.id>. (Bea Cukai, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2016). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(3), 37.
- Tabitha, S. S. (2022). Kerja sama Indonesia-Thailand Dalam Pemberantasan Narkoba Menuju Drug-Free Asean 2015. *Moestopo Journal International Relations*. Vol. 2. No.2 , Hal. 160-173.
- Aulia Srifauzi, N. A. (2022, Agustus). Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean". *PIR Journal*. Vol. 7. No.1, Hal.41.
- Dayamas. (2019, November 27). *Bilateral Meeting Indonesia dan Thailand dalam P4GN*. Dipetik Agustus 2024, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnnn.go.id/>
- Mandiri, D. D. (2024, Agustus 6). Bagaimana Kerja Sama yang Dilakukan Antara BNN RI Dengan ONCB Thailand Dalam Mengatasi Kasus Narkotika di Indonesia Tahun 2021-2023. (L. Yuliyanti, Pewawancara)
- Humas BNNRI. (2023, November 27). *BNN RI dan ONCB Thailand Gelar Bilateral Meeting Kokohkan Kerja Sama*. Dipetik Agustus 2024, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/>
- Humas BNN RI. (2023, November 28). *Indonesia - Thailand Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Lawan Narkotika*. Dipetik Agustus 2024, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/>
- Bea Cukai. (2023, Mei 25). *Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023 Dimulai Bea Cukai Perkuat Pengamanan Laut Indonesia*. Dipetik Agustus 2024, dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://becukai.go.id>